BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pajak. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,563 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan BUMDes, yang meliputi pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan yang transparan, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kontribusi BUMDes terhadap peningkatan penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.
2. pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), lemahnya pengelolaan keuangan dan administrasi, serta rendahnya pemahaman pengurus terhadap tugas dan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal dan masih bergantung pada pendamping desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan pemahaman perpajakan agar BUMDes dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan ekonomi desa.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

   Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Pemerintah desa perlu mendorong penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi pengurus BUMDes serta memfasilitasi pelatihan rutin di bidang akuntansi sederhana dan perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes dan memperkuat kontribusinya terhadap pendapatan desa dan ekonomi masyarakat.

2. Bagi Pengurus BUMDes

   Pengurus BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan, administrasi usaha, serta kewajiban perpajakan. Pengurus BUMDes juga disarankan untuk lebih aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau instansi terkait, serta menerapkan pencatatan keuangan dan pelaporan pajak secara tertib dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha dan kepatuhan pajak.

3. Bagi Pendamping Desa

Pendamping desa diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada BUMDes, tidak hanya dalam pembentukan administrasi, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas SDM pengurus BUMDes. Pendampingan perlu difokuskan pada pemahaman tugas dan SOP pengurus, pengelolaan keuangan, serta pelaporan perpajakan agar BUMDes dapat beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pihak eksternal.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti dinas pemberdayaan masyarakat desa dan kantor pajak, disarankan untuk memperkuat sinergi dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan perpajakan bagi BUMDes. Program peningkatan kapasitas SDM yang terintegrasi diharapkan dapat membantu BUMDes memahami kewajiban perpajakan secara lebih komprehensif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak daerah maupun nasional.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja BUMDes dan kepatuhan pajak, seperti sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, atau peran kepemimpinan pengurus BUMDes. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lebih beragam atau memperluas lokasi penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.